

# Civil Society

Pemikiran Kaum Pergerakan  
Menuju Jalan Baru







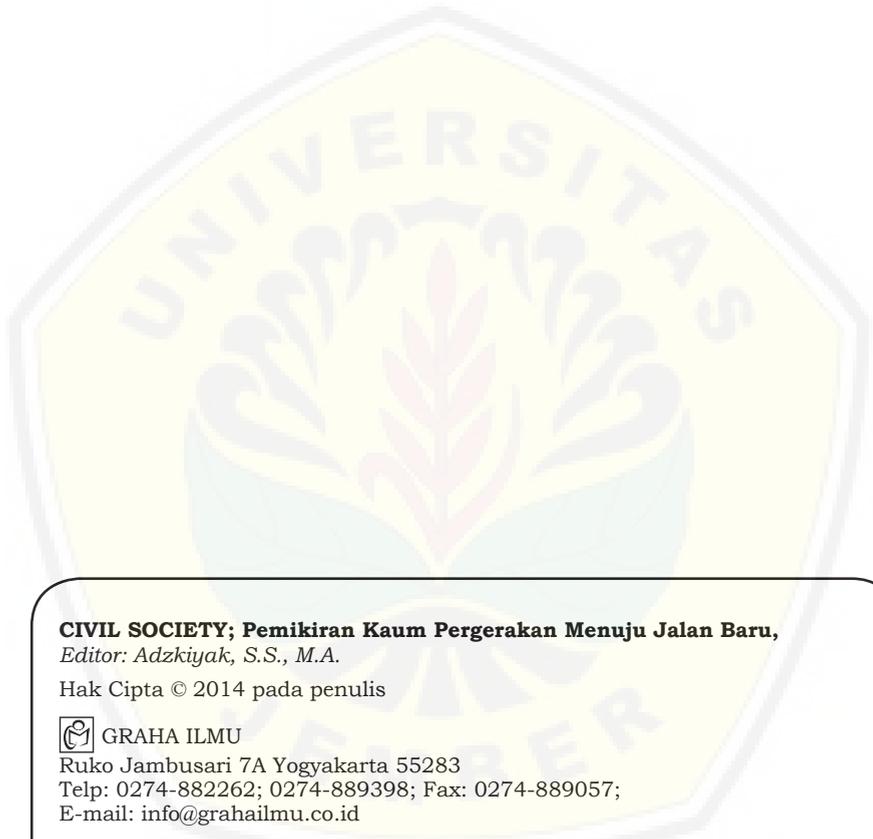
GRAHA ILMU

# Civil Society

Pemikiran Kaum Pergerakan  
Menuju Jalan Baru

**Editor:**  
**Adzkiyak, M.A.**

Kata Pengantar:  
H. M. Nur Purnamasidi, S.Sos.



**CIVIL SOCIETY; Pemikiran Kaum Pergerakan Menuju Jalan Baru,**

*Editor: Adzkiyak, S.S., M.A.*

Hak Cipta © 2014 pada penulis



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057;

E-mail: [info@grahailmu.co.id](mailto:info@grahailmu.co.id)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN:

Cetakan ke I, tahun 2014

## PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah, pada akhirnya buku yang merupakan produk gagasan kolektif sahabat-sababat yang tergabung dalam Kaukus Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Jember ini dapat hadir pada khalayak pembaca. Ide menerbitkan buku bunga rampai dari kumpulan beberapa tulisan ini sudah dimulai sejak lama. Awalnya, gagasan menerbitkan tulisan ini dimulai sejak ketika almarhum Dr. Habibullah masih hidup dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan bagi saya. Setelah beberapa kali berdiskusi secara intens dengan para *funding fathers* kaukus alumni akhirnya saya sebagai editor mencoba meramu tulisan tersebut untuk menjadi sebuah buku berjudul: *Civil Society: Pemikiran Kaum Pergerakan Menuju Jalan Baru*. Redaksional judul buku ini lahir dari proses pemikiran dan diskusi yang panjang. Sempat beberapa kali judul buku mengalami perubahan, awalnya diberi judul Meretas Jalan Baru *Civil Society* yang Humanis. Setelah saya sampaikan pada sahabat-sahabat, judul itu kurang menyentuh isi. Dengan pertimbangan, masukan dan saran tersebut, akhirnya judul buku diambil sebagaimana yang ditulis di atas.

Secara pribadi, terbitnya buku ini merupakan bagian dari pelunasan “hutang” saya selaku editor, kepada sahabat-sahabat yang tergabung dalam Kaukus Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Jember. Pada awalnya, saya mengharapkan buku ini dapat terbit tepat pada waktu dan isinya juga ideal. Akan tetapi, kendala dan tantangan selama pengumpulan tulisan ini ternyata tidak mudah. Gagasan awal, buku ini akan ditulis oleh alumni sesuai profesi yang diemban, seperti petani, aktivis, dosen, guru, wartawan,

anggota DPR, LSM dan lain sebagainya. Namun dalam perjalanannya ide yang digagas tersebut tidak berjalan mulus. Banyak alasan yang disampaikan sahabat-sahabat ketika saya menanyakan, apakah tulisan sudah selesai? Jawaban yang diberikan sangat beragam, mulai alasan kesibukan sampai menulis tidak berdampak ekonomi. Berbagai alasan ini saya hadapi dengan penuh kesabaran meskipun kadang-kadang juga melelahkan. Meskipun demikian, selama proses itu pula dalam hati kecil saya masih berkeyakinan bahwa suatu saat harapan untuk menerbitkan buku ini pasti terwujud, meskipun tanpa batas waktu yang jelas, entah sampai kapan.

Selama proses pengumpulan tulisan sahabat-sahabat, saya sudah memberikan undangan dengan pedoman penulisan kepada lebih dari 30 alumni. Akan tetapi tulisan yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar 15 tulisan. Dari tulisan yang sudah terkumpul tersebut kemudian saya memilih judul yang relevan dengan tema buku ini. Pada akhirnya saya mengambil 11 tulisan untuk diedit dan diterbitkan dalam buku ini. Beberapa tulisan dari sahabat yang belum dimuat dalam buku ini bukan karena kualitas isi yang terkandung didalamnya tetapi lebih pada pertimbangan substansi yang masih belum memenuhi tema yang diinginkan. Selain itu, secara teknik tulisan sahabat-sahabat belum sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam pedoman yang diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat pada sahabat-sahabat yang telah menulis tetapi belum bisa diterbitkan, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas usaha yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan setelah terbitnya buku ini ada usaha dari sahabat-sahabat lain untuk menerbitkan karya-karya selanjutnya. Amin.

Setidaknya saya merasakan beberapa kesulitan selama proses editing buku ini. *Pertama*, gaya masing-masing penulis dalam menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan tidak sama. Ada penulis yang dengan runtut dan “renyah” memaparkan gagasannya sehingga enak dibaca tetapi masih ada juga yang penyajiannya masih kaku dan kadang membingungkan. Dalam hal ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyeragamkan teknik penulisan sehingga mudah dipahami dan enak dibaca. *Kedua*, meskipun sebelumnya sudah terdapat panduan dalam penulisan

buku ini tetapi tidak sedikit penulis yang mengesampingkan rambu-rambu tersebut. Seperti misalnya, untuk keseragaman dalam hal pengutipan para penulis diharapkan menggunakan model catatan kaki akan tetapi masih banyak yang keluar dari bingkai tersebut. Oleh karena itu, saya sebagai editor menyampaikan bahwa secara ilmiah tanggung jawab isi buku ini berada dipundak masing-masing penulis.

Pembagian tulisan dalam buku ini didasarkan pada dua hal: *pertama*, tulisan dibagi berdasarkan kesamaan dan kesesuaian tematik; dan, *kedua*, berdasarkan hasil pengalaman penulis dalam ruang pergulatan sosial, budaya dan akademik. Terdapat beberapa tulisan yang secara tematik hampir sama tetapi ditempatkan pada bagian yang berbeda, misalnya tulisan tentang pemberdayaan masyarakat sipil seperti perempuan perdesaan dan kaum nelayan berada dibagian kesatu dan bagian keempat dalam buku ini. Penjelasan mengenai pembagian isi buku ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami *content* yang ada di dalamnya.

Buku ini terdiri dari empat bagian. Pada bagian awal buku ini diberi judul Perempuan dan Penguatan *Civil Society* dengan tiga penulis perempuan yang banyak terlibat dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kaum perempuan. Ruby Kholifah, adalah Director AMAN Indonesia, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja pada isu perempuan dan perdamaian di Indonesia. Ia menulis pengalaman pendampingan perempuan di daerah konflik Aceh dan Poso dengan judul: *Transformasi Sosial: Perempuan Akar Rumput Membangun Perdamaian*. Tulisannya menggambarkan bagaimana peran perempuan akar rumput dalam meng-gagas perdamaian secara alamiah. Ceritanya dimulai dari perempuan di kepulauan Solomon (terletak berdekatan dengan Papua Nugini) yang dinilainya sebagai gerakan perdamaian yang mengandung kekuatan bios (alamiah). Selanjutnya, ia mengisahkan hal yang sama oleh perempuan di Maluku, Poso dan Aceh dengan memberikan penekanan pada kesamaan kecenderungan perempuan dalam mengeksplorasi ruang-ruang rekonsilia-si. Potensi dan peran kaum perempuan dalam mengerakkan perdamaian di daerah konflik merupakan kekuatan yang mampu mendorong kohesifitas

sosial. Diakhir ceritanya, direktur AMAN ini memberi catatan perlunya pelibatan peran perempuan dan anak-anak dalam proses perdamaian di daerah konflik.

Tulisan kedua pada bagian ini disampaikan oleh Linda Dwi Eriyanti, alumnus Program Pascasarjana, Jurusan Hubungan Internasional, UGM ini menulis *Ancaman Humman Security Perempuan dan Civil Society di Indonesia*. Mengawali tulisannya dengan menunjukkan manifestasi ketidakadilan gender yang meliputi empat aspek mendasar, diantaranya: aspek budaya, dimana perempuan terkungkung dengan *stereotype* yang dilekatkan pada dirinya untuk tidak keluar dari peran domestiknya. Aspek publik dan domestik, perempuan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Aspek ekonomi, perempuan mengalami marginalisasi dan harus menanggung beban ganda jika ingin berkiprah di ruang publik. Aspek politik, perempuan selalu menempati posisi sub-ordinan, baik di struktur pemerintahan, maupun di tingkat perwakilan rakyat. Sebagai warga negara, perempuan juga hanya ditempatkan sebagai obyek dalam setiap kebijakan pemerintah yang memang seringkali menjadi monopoli kaum laki-laki. Menurutnya, kondisi yang demikian ini menjadi ancaman yang selalu membayangi kaum perempuan mulai dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Pada akhirnya, ketidakadilan gender ini berdampak pada kerentanan dan ancaman yang ditanggung kaum perempuan dalam hal: *economic security, food security, health security, environment security, community security, personal security, dan political security*.

Bagian ini diakhiri dengan tulisan Deditiani Tri Indrianti, alumnus Program Pasca Sarjana, Program Studi Interdisipliner Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, UGM ini menulis *Keberdayaan Perempuan Perdesaan dan Upaya Membangun Civil Society pada Aras Lokal*. Tulisannya mengkritisi program pemberdayaan pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum berkeadilan gender. Menurutnya, selama ini telah terjadi kesenjangan dalam proses pemberdayaan yang menyangkut: akses, dinama kemampuan perempuan untuk mendapatkan informasi lebih kecil dibandingkan laki-laki. Akibatnya, peluang yang dimiliki perempuan

untuk mendaftarkan diri menjadi penerima manfaat program jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Partisipasi, tingkat kehadiran maupun kontribusi perempuan dalam setiap kegiatan sangat rendah. Akan tetapi perempuan memiliki kemampuan dalam merumuskan kegiatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun laki-laki memiliki superioritas untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Kontrol, perempuan lebih banyak mengetahui penggunaan dana usaha pinjaman yang diberikan kepada laki-laki akan tetapi tidak mengetahui laporan keuangan yang mestinya dibuat UPK. Manfaat, perempuan lebih memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi usaha ekonomi dibandingkan laki-laki.

Bagian Kedua, membahas mengenai Peran Kaum Intelektual dalam Membangun Peradaban *Civil Society*. Tulisan pertama dikemukakan oleh budayawan dan akademisi Akhmad Taufiq yang menulis tentang *Perubahan Paradigma Pendidikan dan Penguatan Politik Multikultural: Catatan untuk Revolusi Institusional Kebudayaan*. Gagasannya diawali dengan perlunya penanganan masalah kebangsaan ini dengan strategi kebudayaan. Berpikir strategis kebudayaan berarti melakukan pembalikan cara berpikir dan bersikap yang sekedar sebagai resipien suatu kebudayaan, bukannya sebagai agen atau aktor kebudayaan itu sendiri yang penuh tindakan kreatif dan inovatif. Menurutnya, pondasi penting yang harus di tata ulang dalam membangun aktualisasi dan strategi kebudayaan adalah masalah pendidikan dan politik. Memposisikan masalah pendidikan sebagai pilar strategi kebudayaan adalah menjadikannya ruang untuk memanusiaikan manusia. Oleh karenanya, pendidikan pada hakikatnya adalah sarana pembebas dan pencerahan akal budi manusia. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah politik. Ukuran bagaimana keberhasilan bangunan politik suatu negara adalah seberapa besar negara mampu menggerakkan masyarakat sebagai warga bangsa ini untuk menjadi warga partisipatif. Selanjutnya, tulisan ini diakhiri dengan tawaran konsep tentang perlunya revolusi institusi kebudayaan.

Dilanjutkan oleh Mohammad Hadi Makmur, aktivis sekaligus akademisi yang konsen mengkritisi kebijakan negara ini menulis judul:

*Membaca Kebijakan Diskriminasi di Daerah.* Dalam tulisannya, dia berpandangan bahwa negara telah gagal dalam mengelola kemajemukan masyarakat. Bahkan, negara justru memberikan ruang bagi munculnya kekerasan dengan munculnya perda berbasis syariat yang terdapat di daerah. Perda berbasis syariat ini telah menyebabkan berkurangnya ruang gerak warga negara karena pembatasan hak kemerdekaan berekspresi, pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum (kriminalisasi) dan perlindungan ekonomi, pembatasan kebebasan tiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya, dan pembatasan atas kebebasan memeluk agama bagi kelompok Ahmadiyah. Akhirnya, dia mengharapkan kehadiran negara yang mampu mengelola dan memberikan ruang gerak dalam berekspresi bagi warga negaranya, sebagaimana yang pernah dimunculkan oleh Gus Dur dan Sukarno. Menurutnya, kedua pemimpin ini mampu menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang jauh dari ancaman akibat sekat-sekat perbedaan.

Bagian ini ditutup dengan tulisan pakar hukum internasional yang saat ini masih melanjutkan studi doktoral di negara eropa. Alumnus Lancaster University, memberi judul tulisannya *Mengikis Diskriminasi dalam Demokrasi*. Gagasan yang diusung adalah bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat yang anti diskriminasi dalam sebuah tatanan dan sistem demokrasi. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bermartabat dan memiliki hak-hak fundamental yang melekat. Oleh karenanya, penghargaan hak-hak dasar ini perlu dijaga dan dilindungi sebagaimana nilai-nilai substantif demokrasi. Selanjutnya dia memberikan catatan betapa pentingnya peran pemerintah dalam suatu negara dalam perlindungan HAM. Dalam konteks ini pemerintah menjalankan dua fungsi sekaligus. *Pertama*, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berwenang mengatur kehidupan hak asasi manusia agar tidak melanggar hak fundamental orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan nasional. *Kedua*, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak asasi bagi semua warga negara dan penduduk di Indonesia yang salah satu caranya adalah dengan mengeliminir berbagai kebijakan yang masih diskriminatif.

Bagian ketiga, mengulas mengenai *Social Movement dalam Mewujudkan Civil Society*. Tulisan pertama disampaikan oleh Adzkiyak dengan tema gerakan sosial yang diberi judul *Dari Payang ke Minitrawl: Perlawanan Nelayan Tradisional Terhadap Negara*. Konflik ini terjadi di wilayah pesisir utara Lamongan pada awal reformasi, tepatnya tahun 1999. Periode ini ditandai runtuhnya rezim tiran orde baru dari tampuk kekuasaan. Melemahnya otoritas negara dalam menjalankan fungsinya telah memunculkan semangat perlawanan kaum nelayan. Keterlibatan birokrasi pemerintah daerah dan aparat keamanan, baik tentara dan polisi dalam melindungi penggunaan alat tangkap *minitrawl* yang digunakan nelayan Weru Kompleks menunjukkan betapa masifnya perselingkuhan antara kekuasaan dengan kegiatan bisnis perikanan laut. Ketika persoalan ini terjadi berlarut-larut tanpa penyelesaian yang pasti, akhirnya menimbulkan rasa kekecewaan nelayan tradisional terhadap aparat militer, oknum pemerintah daerah, dan elit ekonomi lokal. Perlawanan nelayan tradisional ini menyebabkan kerusakan simbol-simbol kekuasaan negara pada waktu itu, seperti kantor polisi, koramil, kecamatan, tempat wisata dan asset ekonomi bupati Lamongan. Perlawanan yang dilakukan nelayan tradisional ini merupakan bagian dari upaya untuk menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam menegakkan harkat dan martabatnya dihadapan negara.

Tulisan berikutnya disampaikan oleh Taufik Al Amin, mantan aktivis yang sekarang menjadi staf pengajar di STAIN Kediri ini menulis *Ruang Publik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam tulisannya dia mengkritisi bagaimana peran media dalam membangun opini publik sehingga mempengaruhi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat. Peran media sangat urgen dalam membentuk pola pikir dan karakteristik masyarakat. Apabila peran media mampu menciptakan sesuatu yang positif maka masyarakat akan terbedayakan. Akan tetapi kuatnya tarik ulur kepentingan ideologi media menjadikan informasi yang diberitakan dipengaruhi oleh kepentingan materi. Pada titik inilah media dituntut tidak hanya memberikan informasi yang penting dan menarik menurut selernya tetapi bagaimana menjaga nilai dan relevansi informasi yang harus diberikan pada masyarakat.

Diakhir tulisannya, dia menegaskan pentingnya peran kaum intelektual dalam memainkan peran dalam perberdayaan masyarakat. Dengan mengutip pandangan Zygmunt Bauman, bahwa kaum intelektual merupakan golongan yang melegitimasi nilai-nilai universal. Bauman, membedakan karakteristik intelektual menjadi beberapa bagian, yaitu intelektual yang bersifat fungsional yang melayani dan melegitimasi nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat dengan intelektual yang cenderung mengkritisi dan menentang apa yang telah ada.

Dilanjutkan oleh tulisan Edi Wahyudi yang menggambarkan hasil pengalamannya pemberdayaan yang dilakukan. Ia menulis *Metodologi Transfer Inovasi Usaha Kecil Berorientasi Pemberdayaan*. Studi kasus mengenai model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan di wilayah pesisir Pasuruan. Berbagai kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh Usaha Kecil menengah masyarakat pesisir perlu penanganan secara serius dari berbagai pihak termasuk didalamnya peran perguruan tinggi, pemerintah dan swasta. Pentingnya semua pihak mendorong dan mentransformasikan berbagai inovasi, baik manajemen, teknologi dan peluang pasar dalam upaya menumbuhkan semangat kegiatan usaha ekonomi informal yang dilakukan masyarakat pesisir. Pendampingan dan pemberdayaan yang secara intens perlu terus menerus dilakukan agar kemandirian dan pengembangan usaha ini mampu mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai cacatannya, bahwa pemberdayaan perlu dilakukan dengan memperhatikan kultur masyarakat pesisir sehingga upaya yang dilakukan tidak sia-sia.

Bagian keempat, menjelaskan relasi Agama dan Penegakan *Civil Society*. Terdapat dua penulis, pertama tulisan Syukron Ma'mun mengingatkan kembali pada kita akan pentingnya *Meneguhkan Kembali Civil Society* NU. Tulisan ini menjelaskan bagaimana proses sejarah dan dinamika politik mempengaruhi organisasi masyarakat keagamaan NU dari waktu ke waktu dalam membangun cita-cita *civil society* di Indonesia. Menurutnya, ada kegagalan yang dihadapi oleh ormas terbesar ini dalam menghadapi hiruk pikuk politik pasca reformasi. Banyaknya kyai

di kalangan NU yang terlibat dalam dunia praktis politik semakin mengaburkan garis perjuangan dan cita-cita dalam membangun masyarakat yang kuat. Kyai yang banyak tergoda dalam dunia politik semakin sulit membedakan mana yang sakral dan profan. Dimana nilai-nilai agama bercampur baur dengan masalah duniawi. Pondok pesantren bukan menjadi *centrum* pendidikan agama yang mencerdaskan ummat tetapi lebih banyak terlibat pada kepentingan politik sesaat. Dalam situasi inilah gagasan yang di tulis oleh sahabat Sukron Ma'mun menjadi sangat urgen dan relevan dalam melihat ormas terbesar di Indonesia ini.

Menyambung tulisan pertama di bagian ini Saman Hudi mempertegas posisi Kyai, Politik dan Perubahan Sosial yang ada di masyarakat pasca reformasi. *Setting* sosial dan politik tulisan ini mengambil lokasi di masyarakat yang menjadi basis kuat ormas NU, yaitu Jember. Tulisannya menguraikan dwi fungsi kyai, dimana peran seorang kyai ditarik dalam dua kutup yang seringkali memunculkan berbagai persoalan, yaitu masalah agama dan politik. Ketika pada saat yang sama seorang kyai mampu mempertahankan posisinya sebagai penjaga nilai-nilai agama maka ummat akan menjadi kiblat panutan dalam mencari solusi persoalan keagamaan. Sayangnya, tarikan politik yang begitu kuat masuk dalam dunia kyai menyebabkan runtuhnya kewibawaan dan otoritas kyai. Status kyai bukan lagi menjadi sakral dan keramat karena ummat semakin banyak yang memandang simir dan sinis. Pondok pesantren tidak lagi ramai dengan lantutan suara santri mengaji dan ceramah agama para kyai tetapi lebih banyak digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi masalah politik dan kepentingan individual kyai. Temuan Saman Hudi menunjukkan, bahwa intensitas kyai dalam dunia politik akan mengurangi aktivitas kyai di pesantren, terjadinya segmentasi sosial dan konflik horizontal. Pada titik inilah perubahan sosial telah menggeser kedudukan dan peran kyai sebagai tokoh ummat menjadi pelayan kepentingan politik kelompok.

Pada penghujung tulisan ini sampailah saya pada kesempatan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu proses rampungnya buku bunga rampai ini. *Pertama*, kepada H. M.

Nur Purnamasidi, S.Sos, yang memberikan banyak *support* baik material maupun non material dan rela meluangkan waktunya untuk memberikan kata pengantar dalam buku ini. Terima kasih Bang, semoga peran sosial politik jenengan terus menyemai manfaat bagi kehidupan ummat. Amin. *Kedua*, kalimat khusus saya persembahkan kepada seseorang yang dihormati kaukus alumni, yaitu sahabat Drs. Muhammad Nur Hasan, M. Hum., yang mengarahkan ide dan sekaligus memberikan komentar buku ini, sehingga dapat hadir dihadapan khalayak umum. *Ketiga*, tak lupa juga kepada sahabat Mohammad Hadi Makmur, S.Sos., M.A.P selaku ketua kaukus alumni dan sahabat Ahmad Taufiq, M.Pd., yang memberikan semangat selama proses editing buku ini sehingga menambah keyakinan saya untuk bekerja lebih baik. Sahabat-sahabat kaukus alumni lainnya yang pada kesempatan ini tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas masukan dan kritiknya yang diberikan selama ini.

Kehadiran buku ini merupakan bagian dari semangat untuk melawan lupa bahwa kita pernah ada dan berbuat sesuatu bagi sesama. Semoga sifat kelupaan tidak menjadikan kita angkuh dan sombong sehingga lalai untuk berintropeksi dalam memperbaiki diri. Akhirnya, saya sebagai editor menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saya membuka ruang kritik dan saran kepada para pembaca demi kesempurnaan buku ini. Selamat membaca!

Jember, 03 September 2014

Editor

Adzkiyak, M.A

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan akal pikiran pada kita semua sehingga dalam kesempatan ini dipertemukan dalam sebuah ruang gagasan yang mencerahkan. Gagasan yang bersumber pada akal pikiran kita sebagai makhluk yang diberikan keistimewaan dalam mencari solusi atas berbagai persoalan kebangsaan. Tugas dan tanggungjawab sebagai entitas cendekiawan organik adalah mampu memberikan solusi pemikiran yang bernas dan mendesiminasikannya pada khalayak masyarakat. Salah satunya adalah menghadirkan sebuah karya akademik yang bermanfaat untuk kepentingan publik. Kehadiran karya yang berjudul: *Meretas Jalan Baru Civil Society: Percikan Pemikiran Kaum Pergerakan* memberikan setetes harapan bahwa masih ada upaya untuk menemukan jalan terang di tengah lorong kegelapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itulah, buku yang ditulis oleh mantan aktivis mahasiswa ini menemukan momentumnya yang tepat.

Kekuatan *civil society* yang direpresentasikan oleh LSM, Ormas, dan kelompok sosial lainnya yang diharapkan mampu membangun kekuatan dan potensi masyarakat ternyata hari ini justru semakin sulit didefinisikan. Kehadiran kekuatan sipil yang mewakili kepentingan masyarakat semakin jauh dari ekspektasi kita semua, karena sering menjelma menjadi kekuatan dan kepentingan kelompok lain, seperti pemodal dan penguasa. Mengandaikan kekuatan *civil society* yang kuat dan mandiri tentu bukan jalan mudah untuk memperolehnya. Sejarah telah menunjukkan, bahwa bangsa dan negara yang beradab adalah mereka yang mampu menempatkan kekuatan masyarakat secara otonom dan mandiri dihadapan negara.

Sehingga dengan sendirinya negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap hak-hak warga negara. Sudah sepatutnya kehadiran negara berke-wajiban memenuhi hak-hak warga negara sehingga keberadaannya tidak nir fungsi dihadapan rakyatnya sendiri.

Keprihatinan kita semua atas kondisi bangsa dan negara Indonesia yang semakin hari semakin mencemaskan. Hancurnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini nyaris sempurna sehingga sulit dicari solusi yang mujarab untuk menyembuhkannya. Suasana karut marut masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik yang menyandera bangsa ini terus terjadi tanpa upaya serius untuk mencegahnya. Bahkan celakanya, banyak di antara anak bangsa berlomba-lomba untuk menghancurkan negeri sendiri. Fenomena korupsi, disintegrasi sosial, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, separatisme dan deretan persoalan lainnya merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas semua persoalan tersebut, sandaran terakhir kita adalah bagaimana membangun bangsa dan negara ini dimulai dari bawah melalui kekuatan masyarakat sipil yang masih memiliki pendirian dan komitmen untuk tetap menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara yang mandiri dan berkeadilan sosial. Semoga terbitnya buku ini menjadi penanda atas cita-cita kita semua untuk mewujudkan *civil society* yang kuat dan otonom. Akhirnya saya hanya bisa menyampaikan mari kita Meretas Jalan baru *Civil Society*. Amin.

**Jakarta, 03 Pebruari 2014**

H. M. Nur Purnamasidi, S.Sos.

**DAFTAR ISI**

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	xv
<b>DAFTAR ISI</b>	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xix
<b>DAFTAR TABEL</b>	xxi
<b>BAGIAN KESATU:</b>	
<b>PEREMPUAN DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY</b>	<b>1</b>
Transformasi Sosial:	
Perempuan Akar Rumput Membangun Perdamaian	
<i>Ruby Kholifah</i>	3
Ancaman <i>Human Security</i> Perempuan dan <i>Civil Society</i> Indonesia	
<i>Linda Dwi Eriyanti</i>	33
Keberdayaan Perempuan Perdesaan dan Upaya Membangun	
<i>Civil Society</i> pada Aras Lokal	
<i>Deditiani Tri Indrianti</i>	49
<b>BAGIAN KEDUA:</b>	
<b>PERAN KAUM INTELEKTUAL DALAM MEMBANGUN</b>	
<b>PERADABAN CIVIL SOCIETY</b>	<b>71</b>
Perubahan Paradigma Pendidikan dan Penguatan Politik Multikultural:	
Catatan untuk Revolusi Institusional Kebudayaan	
<i>Akhmad Taufiq</i>	73

Mengikis Diskriminasi Dalam Demokrasi <i>Al Khanif</i>	91
Sesat Nalar Kebijakan: Membaca Kebijakan Diskriminatif di Daerah <i>Moh. Hadi Makmur</i>	111
<b>BAGIAN KETIGA: SOCIAL MOVEMENT DAN TANTANGAN MEMBANGUN CIVIL SOCIETY</b>	<b>127</b>
Dari <i>Payang</i> ke <i>Minitrawl</i> : Perlawanan Nelayan Tradisional Terhadap Negara <i>Adzkiyak</i>	129
Ruang Publik dan Pemberdayaan Masyarakat <i>Taufik Al Amin</i>	149
Metodologi Transfer Inovasi Usaha Kecil Berorientasi Pemberdayaan <i>Edy Wahyudi</i>	169
<b>BAGIAN KEEMPAT: AGAMA DAN PENEGAKAN CIVIL SOCIETY</b>	<b>197</b>
Meneguhkan Kembali Agenda <i>Civil Society NU</i> <i>Sukron Ma'mun</i>	199
Kyai, Politik dan Perubahan Sosial <i>Saman Hudi</i>	219
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>245</b>
<b>GLOSARIUM</b>	<b>247</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>251</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kendala Inovasi	184
Gambar 2.	Inovasi Teknologi Berbasis Kultur Kerja	185
Gambar 3.	Kendala Inovasi Produk	186
Gambar 4.	Upaya Mengatasi Kendala Inovasi Produk	187
Gambar 5.	Inter Firm Linkage/ Kerjasama Antar Usaha Kecil Nelayan	190
Gambar 6.	Key Success Factor Sustainability Innovation Transfer	192

-oo0oo-



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.	Data Terpilah Akses Masyarakat dalam Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul	55
Tabel 3.	Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul	57
Tabel 4.	Kontrol Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program Gerdu-Taskin	58
Tabel 5.	Manfaat Program Gerdu-Taskin bagi Masyarakat di Desa Suger Kidul	59
Tabel 6.	Daftar Penerima Manfaat Pemberdayaan Usaha Pada Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul	60
Tabel 7.	Analisis Gender Berdasarkan Profil Kegiatan Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul	62
Tabel 8.	Analisis Gender Profil Akses dan Kontrol pada Sumberdaya Produksi	63
Tabel 9.	Analisis Gender Akses dan Kontrol pada Manfaat dari Kegiatan Pembangunan	63
Tabel 10.	Matrik Analisis Gender Pada Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul	64
Tabel 9.	Bentuk Diskirimanasi Peraturan Daerah	112

# **KEBERDAYAAN PEREMPUAN PERDESAAN DAN UPAYA MEMBANGUN *CIVIL SOCIETY* PADA ARAS LOKAL**

*Deditiani Tri Indrianti*

## **Pengantar**

Krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan dan menyebabkan keterpurukan sebagian besar masyarakat. Untuk itu pemerintah Propinsi Jawa Timur menetapkan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dengan pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan secara terpadu. Hal tersebut dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur (*Pedum Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan*, 2004: 1). Namun, hadirnya program Gerdu-Taskin sebagai *recovery* akibat krisis pun belum berjalan maksimal.

Ketidakadilan gender sebagai akar penyebab kemiskinan belum menjadi fokus perhatian pemerintah serta belum menjadi indikator utama dampak program Gerdu-Taskin. Oleh karena itu, perlu implementasi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Namun demikian, pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) belum cukup membawa hasil memuaskan apabila mengabaikan karakteristik sosial budaya yang telah melembaga dalam sistem sosial di tingkat lokal. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengemukakan bagaimana program pemberdayaan perempuan di perdesaan dengan upaya membangun *civil society* pada aras lokal. Studi kasus ini dilakukan di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

## **Pembangunan dan ketidakadilan gender**

Teori Harrod-Domar menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi serta teori Rostow, tentang lima tahap pembangunan pernah mewarnai konsep pembangunan di Indonesia. Akan tetapi implementasi teori dan konsep tersebut memiliki kecenderungan dampaknegatif. Di mana pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat yang memiliki akses sumber daya. Akan tetapi di pihak lain, seperti sebagian besar kaum perempuan belum merasakan hasil pembangunan, bahkan menjadi korban pembangunan karena kurangnya akses sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas perlu formulasi proses pembangunan yang lebih menekankan keadilan dan merealisasikan gagasan pembangunan masyarakat (*putting people the first*). Di mana kegiatan pembangunan didasarkan pada prakarsa lokal, sumber daya lokal dan kepemimpinan lokal. Sebagaimana diungkapkan Rasuanto (2005:6) bahwa keadilan sosial bukan sekedar masalah distribusi ekonomi saja, melainkan jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan. Bahkan, Rawls (3:2006) menjelaskan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi. Meskipun keadilan bersifat abstrak, tetapi memberikan dasar bagi kerjasama sosial masyarakat. Mengingat, bahwa norma sosial berpotensi membentuk kewenangan atas kepemilikan sumberdaya berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan ungkapan Irianto (2004:62), bahwa perlunya perhatian terhadap masalah akses perempuan dan laki-laki kepada penguasaan dan pengelolaan sumberdaya, karena keadilan gender merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia.

## **Pengarusutamaan gender dalam pembangunan**

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah guna menghapus ketidakadilan gender. Di mana implikasi kebijakan pembangunan lebih memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis gender. Mengingat, ketimpangan gender merupakan akar penyebab muncul-

nya masalah kemiskinan. Dalam teori feminis dikatakan bahwa ketidakadilan gender di masyarakat bukan hanya terjadi karena menempatkan laki-laki dan perempuan secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara khusus perempuan jauh lebih sedikit memperoleh sumberdaya material, status sosial, kekuasaan dan aktualisasi.

Fakih (1996:35) mengatakan, ketidakadilan atau ketimpangan gender disebabkan perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, laki-laki dianggap kuat dan lebih mampu. Sebagaimana ulasan beberapa pakar yang menggali akar historis dan struktural ketidakadilan gender, bahwa: *Pertama*, adanya dhikotomi maskulin/ feminim peranan manusia sebagai akibat dari determinisme biologis, seringkali mengakibatkan proses marginalisasi wanita; *kedua*, adanya dikotomi peran publik/ peran domestik yang berakar dari *syndrome* bahwa peran wanita adalah di rumah pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara pria dan wanita; *ketiga*, adanya konsep beban kerja ganda yang melestarikan wawasan bahwa tugas wanita terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung menghalangi proses aktualisasi potensi wanita secara utuh; dan, *keempat*, yaitu adanya *syndrome* subordinasi dan peran marginal wanita telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi wanita dalam masyarakat adalah bersifat sekunder (Tjokrowinoto, 2004: 59).

Bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender antara lain sebagai berikut: *pertama*, *stereotype*, yaitu pandangan negatif terhadap relasi gender yang menyebabkan ketidakadilan. Pandangan ini mengakibatkan perempuan selalu dirugikan, misalnya perempuan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pekerjaan terkait dengan pekerjaan domestik, sehingga peran perempuan di ruang publik merupakan perpanjangan tangan domestik; *kedua*, *subordinasi*, yaitu keyakinan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dan lebih utama. Nilai-nilai masyarakat yang telah melembaga mengakibatkan perempuan ditempatkan pada posisi subordinat. Hal ini

menyebabkan perempuan sering mendapatkan ketidakadilan di lingkungan kerja; *ketiga*, marginalisasi, yaitu proses peminggiran dan ketidakadilan perempuan akibat perbedaan jenis kelamin; *keempat*, kekerasan, yaitu bentuk kekerasan fisik serta kekerasan psikis, sehingga laki-laki atau perempuan mengalami gejolak emosional dan ketidaktenangan batin; *kelima*, beban ganda, yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam menjalankan beban kerja antara laki-laki dan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2005:34-35). Tujuan pembangunan dapat dicapai jika formula pembangunan direncanakan dan didistribusikan berdasarkan keadilan melalui prinsip kesetaraan hak dan wewenang secara proporsional (Dian Rakyat, 2005:107). Secara kebetulan perempuan menjadi korban. Ketidakadilan gender dalam pembangunan membatasi kemampuan perempuan memanfaatkan hasil pembangunan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi keputusan rumah tangga, sehingga berdampak terhadap investasi anak dan kesejahteraan rumah tangga (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI Kerjasama dengan UNDP, 2007:81). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sebagai penyangga ekonomi keluarga yang cukup signifikan (Darmawan dan Kartika dalam Sunartiningsih, 2004:144). Untuk itu perlu kecermatan bahwa terdapat signifikansi peran masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Mengingat, kemiskinan dan ketidakadilan gender saling mempengaruhi secara dialektis.

## **Pendekatan pemberdayaan dalam program pembangunan**

Secara keilmuan konsep pemberdayaan muncul dari respon terhadap masalah yang dihadapi masyarakat di akhir abad ke-20. Hal ini dikatakan oleh Zubaidi (2007:15), bahwa keberpihakan terhadap nasib orang lemah dilakukan dengan mengubah model gerakan sosial dari kontrol sosial ke metode praktik yang mencoba memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kemasyarakatan secara kolaboratif-partisipatoris.

Dalam perspektif pemerintah, gagasan *empowerment* (pemberdayaan) hadir sebagai pendekatan pembangunan karena adanya dua pre-

mis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Sebagaimana dikatakan oleh Friedmann dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:59) bahwa model pembangunan ekonomi guna menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan mengalami kegagalan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai,

Namun dari perspektif masyarakat, gagasan dasar pemberdayaan muncul karena adanya pandangan bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya sadar membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan. Konsep pembangunan ini dipengaruhi oleh pemikiran Freire yang mengembangkan pendidikan pembebasan bagi kaum tertindas. Freire menyatakan yang terpenting bagi kaum tertindas adalah proses penyadaran (*conscientization*), terdapat proses kesadaran kritis dalam diri individu tentang situasi lingkungannya, sehingga individu dengan kemampuan sendiri dapat mengendalikan lingkungan di sekitarnya (Amien, 2005:158, Sukesi dalam Sugiarti, 2003:188). Oleh sebab itulah saat ini program penyadaran menjadi agenda utama pembangunan.

Hipotesis yang dikembangkan dalam artikel ini adalah sebagai berikut, *pertama*, implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan program Gerdu-Taskin dapat mewujudkan keadilan gender. *Kedua*, terdapat potensi kelembagaan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam program Gerdu-Taskin sebagai upaya untuk meningkatkan keadilan gender.

## **Kondisi masyarakat penerima program gerdu-taskin**

Suger Kidul merupakan wilayah pedesaan yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan pembatas wilayah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso. Letaknya berada pada ruas jalan utama propinsi serta berada di persimpangan antara Surabaya dan Bali. Luas wilayah yang dimiliki Desa Suger Kidul adalah 3,78 km<sup>2</sup>. Topografi Desa Suger Kidul tergolong daerah perbukitan dan bergunung-

gunung yang relatif baik untuk mengembangkan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Berdasarkan data registrasi pada tahun 2007, komposisi penduduk Desa Suger Kidul menurut jenis kelamin perempuan lebih banyak 0,92 %. Menurut data BPS, Desa Suger Kidul termasuk kategori “desa merah” (desa miskin). Mengingat, sebagian besar kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Suger Kidul tergolong miskin dibandingkan dengan daerah Jember pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang masih tergolong prasejahtera dan sejahtera<sup>1</sup>.

**Tabel 1.** *Komposisi Penduduk Menurut Kondisi Sosial Ekonomi*

No	Kondisi Sosial Ekonomi	Jumlah (kk)	Persentase
1.	Prasejahtera alasan ekonomi	435	34,9
2.	Prasejahtera bukan ekonomi	31	2,6
3.	Sejahtera I	356	28,5
4.	Sejahtera II	189	15
5.	Sejahtera III	178	14
6.	Keluarga sejahtera III+	63	5
Jumlah		1.252	100

Sumber: Kecamatan Jelbuk dalam Angka (BPS:2007)

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Suger Kidul didominasi oleh lulusan SD, yaitu sebesar 668 orang atau 74, 80%. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Desa Suger Kidul berdampak pada jenis pekerjaan yang digeluti masyarakat. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa sumberdaya manusia di Desa Suger Kidul sangat rendah, sehingga perlu pemerataan sektor pendidikan.

## **Implementasi pengarusutamaan gender melalui program gerdu-taskin**

Tujuan Program Gerdu-Taskin melakukan peningkatan kesadaran (*consciousness*) melalui proses pendistribusian keberdayaan kepada masyarakat lemah. Agar, masyarakat memiliki kemampuan berfikir dan bertindak kritis, serta dapat merespon situasi disekitarnya yang berpengaruh terhadap

sumber-sumber kebutuhan hidup. Zubaedi (2007: 15) mengatakan, bahwa keberpihakan terhadap nasib orang lemah dilakukan dengan mengubah model gerakan sosial, dari kontrol sosial ke motoda praktik. Akan tetapi keberpihakan tersebut masih bersifat parsial. Ketidakadilan gender belum menjadi fokus pembangunan.

### 1. Akses Masyarakat dalam Program Gerdu-Taskin

Meskipun belum terdapat data berdasarkan gender mengenai tingkat perbandingan akses antara perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya produktif, namun realitas dalam kehidupan masyarakat mendokumentasikan bahwa perempuan memiliki lebih sedikit akses dalam pembangunan. Bahkan modal usaha perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki akses yang lebih buruk terhadap kredit usaha. Kondisi ini berdampak terhadap rendahnya investasi aset rumah tangga maupun sumberdaya produksi.

Secara terpilah kemampuan laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi, memperoleh bantuan modal usaha, dan mengelola bantuan usaha ekonomi sebagai sumberdaya produktif, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial.

**Tabel 2.** *Data Terpilah Akses Masyarakat dalam Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul*

No	Jenis Akses	Lak-Laki Yang Mendapat Akses		Perempuan Yang Mendapat Akses	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Memperoleh informasi	55	98.2	31	91.1
2.	Memperoleh pinjaman	55	98.2	31	91.1
3.	Mengusulkan pinjaman	39	69	22	64
4.	Mengelola pinjaman	51	91	30	88.2

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, laki-laki memiliki peluang lebih besar memperoleh akses informasi guna mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha, mengusulkan besar pinjaman, serta mengelola pinjaman modal usaha. Dari gambaran di atas, informasi program Gerdu-

Taskin dapat diakses oleh 98,2% laki-laki, sedangkan perempuan memiliki akses informasi 7,1% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rendahnya akses informasi perempuan berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh bantuan pinjaman modal usaha kepada UPK. Namun, berdasarkan analisa kualitatif, mayoritas masyarakat belum mengetahui jenis kegiatan pemberdayaan yang dilakukan UPK maupun Timlak.

Simpulan dari paparan di atas, bahwa terbatasnya akses terhadap sumberdaya produktif dalam pembangunan secara sistematis membatasi kekuatan perempuan untuk memberikan pengaruh dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdaya maupun keputusan rumah tangga.<sup>2</sup> Mengingat, rumah tangga merupakan lingkungan dominan yang melanggengkan ketidakadilan gender.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerdu-Taskin**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keterlibatan perempuan masih belum terlihat maksimal. Kondisi ini disebabkan, bahwa perempuan dianggap memiliki status lebih rendah dari laki-laki. Pernyataan ini ditegaskan oleh Saptari dalam Zubaidi (2007: 210), bahwa keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum maksimal. Hal ini dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang rendah dalam kehidupan masyarakat.

Tingkat kehadiran laki-laki dalam kegiatan program Gerdu-Taskin 56,83% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kehadiran perempuan pun belum memberikan kontribusi nyata. Akan tetapi, sebanyak 11,76% perempuan memberikan sumbangan tenaga, 40,04% lebih banyak dari kontribusi tenaga laki-laki.<sup>3</sup> Perempuan memiliki kemampuan merumuskan kegiatan 19,85% lebih besar dibandingkan laki-laki. Namun, kemampuan merencanakan dan menentukan jenis kegiatan didominasi laki-laki. Perempuan belum menempati posisi strategis dan belum memberikan pengaruh yang signifikan selama pelaksanaan kegiatan program Gerdu-Taskin.

**Tabel 3.** *Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul*

No	Jenis Partisipasi	Laki-laki Yang Berpartisipasi		Perempuan Yang Berpartisipasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kehadiran	45	80.36	8	23.53
2.	Sumbangan Tenaga	29	51.79	4	11.76
3.	Merencanakan Kegiatan	41	73.21	7	20.59
4.	Merumuskan Kegiatan	35	62.5	28	82.35
5.	Menentukan Jenis Kegiatan	33	58.93	6	17.65

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Menurut informasi, minimnya kehadiran perempuan dalam musyawarah pelaksanaan program Gerdu-Taskin disebabkan usaha ekonomi yang dijalankan laki-laki lebih besar dari usaha ekonomi perempuan, sehingga modal usaha yang dibutuhkan laki-laki lebih banyak. Selain itu, pekerjaan domestik yang secara sosial menjadi tanggung jawab perempuan menjadi faktor pemicu.

Selain itu, diketahui bahwa 88,34% perempuan belum memberikan kontribusi riil untuk menyumbangkan tenaga dalam setiap kegiatan. Bahkan 79,41% perempuan belum terlibat dalam perencanaan kegiatan. Jenis kegiatan lebih banyak ditentukan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki akibat pola sexis gender sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat berpengaruh langsung terhadap pembangunan. Oleh sebab itu dominasi untuk merencanakan dan menentukan berbagai jenis kegiatan belum sepenuhnya dilakukan atas dasar prinsip partisipatif.

Berdasarkan analisis data kuantitatif maupun kualitatif, tergambar bahwa partisipasi masih diartikan sebagai bentuk kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan guna melegitimasi kepentingan dan kebutuhan sebagian kelompok masyarakat. Partisipasi belum dimaknai sebagai kontribusi melakukan perubahan. Kemampuan perempuan untuk merumuskan kegiatan cenderung diabaikan. Meskipun pada dasarnya, secara kualitatif maupun kuantitatif kemampuan perempuan merumuskan kegiatan lebih

tinggi dibanding laki-laki. Mengingat, perempuan seringkali bersentuhan langsung dengan berbagai masalah rumah tangga, sosial dan kemasyarakatan.

### 3. Kontrol Masyarakat dalam Program Gerdu-Taskin

Kontrol atas sumberdaya produktif dalam pembangunan merupakan kemampuan masyarakat yang dimanifestasikan dalam perilaku untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan keputusan. Dalam penelitian ini aspek kontrol masyarakat merupakan indikator melakukan evaluasi konsistensi penerapan program Gerdu-Taskin yang meliputi kegiatan pemberdayaan usaha, manusia, dan lingkungan.

**Tabel 4** Kontrol Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program Gerdu-Taskin

No	Jenis Kontrol	Kemampuan Laki-laki Melakukan Kontrol		Kemampuan Perempuan Melakukan Kontrol	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Penggunaan pinjaman usaha	37	66.07	11	32.35
2.	Mengetahui pelaksanaan kegiatan	35	62.5	7	20.58
3.	Mengetahui pokmas peminjam	17	30.36	14	41.17
4.	Mengetahui jumlah dana yang digulirkan kepada masyarakat	32	57.14	4	11.76
5.	Mengetahui dan menegur pokmas yang melakukan tunggakan angsuran	27	48.21	6	17.64
6.	Mengetahui laporan keuangan UPK	16	28.57	1	2.94

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Tabel 4 tergambar, kemampuan perempuan mengetahui penggunaan dana usaha yang bergulir di masyarakat lebih tinggi 33,72% dari laki-laki. Namun, sebanyak 79,41% perempuan belum mengetahui secara pasti jenis kegiatan yang telah dilakukan. Tingkat pengetahuan perempuan terhadap jenis kegiatan Program Gerdu-Taskin 41,92% lebih rendah dibandingkan pengetahuan laki-laki.

#### 4. Manfaat Program Gerdu-Taskin Bagi Anggota Pokmas

Semestinya indikator keberhasilan program Gerdu-Taskin difokuskan pada distribusi hasil kegiatan yang berprinsip keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Tabel 5 di bawah ini menyajikan pemanfaatan program Gerdu-Taskin oleh laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

**Tabel 5.** *Manfaat Program Gerdu-Taskin bagi Masyarakat di Desa Suger Kidul*

No	Jenis Manfaat	Manfaat Bagi Laki-laki		Manfaat Bagi Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Produksi lebih besar	40	71.43	25	73.52
2.	Keuntungan lebih besar	43	76.79	30	88.23
3.	Kepemilikan aset usaha	45	80.36	25	73.52
4.	Memenuhi kebutuhan sosial	50	89.29	28	82.35
5.	Dapat menabung	36	64.29	25	73.52
6.	Menentukan keputusan	54	96.43	21	61.76
7.	Hak mengelola usaha	51	91.07	29	85.29

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa perempuan lebih mampu memanfaatkan bantuan pinjaman usaha pada UPK Gerdu-Taskin untuk meningkatkan produksi usaha ekonomi. Kemampuan perempuan memanfaatkan bantuan pinjaman tersebut 2,09% lebih tinggi dari laki-laki. Kemampuan perempuan memanfaatkan pinjaman modal berpengaruh terhadap tingkat produksi usaha yang dijalankan,<sup>4</sup> sehingga keuntungan hasil usaha lebih banyak diterima perempuan, yaitu 1,44% lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Keuntungan tersebut digunakan untuk menopang ekonomi keluarga. Namun, laki-laki memanfaatkan keuntungan usaha untuk kegiatan sosial. Meskipun demikian, kepemilikan perempuan terhadap aset usaha, menentukan keputusan, serta hak untuk mengelola usaha cukup rendah. Secara kualitatif, hegemoni laki-laki terhadap perempuan cukup tinggi.

Ketidakseimbangan jumlah daftar penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan mendapat pinjaman modal usaha merupakan pemicu awal terjadinya ketimpangan gender meningkatkan keberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan pintu pembuka wawasan adanya ketidakadilan gender yang terjadi pada program Gerdu-Taskin. Di mana kegiatan pembangunan belum dapat terdistribusi secara proporsional.

**Tabel 6.** *Daftar Penerima Manfaat Pemberdayaan Usaha Pada Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul*

No	Kelompok	Jenis Kelamin		Total	Persentase (%)	
		L	P		L	P
1.	Tunggal Harapan	2	0	2	100	0
2.	Sukses Bersama	3	6	9	33.4	66.6
3.	Tunas Maju I	2	8	10	20	80
4.	Tunas Maju II	5	4	9	55.5	44.5
5.	Mandiri II	8	1	9	88.8	11.2
6.	Melati I	3	3	6	50	50
7.	Durian	6	0	6	100	0
8.	Melati II	7	0	7	100	0
9.	Lestari	2	9	11	18.1	81.9
10.	Janur Hijau	9	1	10	90	10
11.	Pribadi	9	2	11	81.8	18.2
Jumlah		56	34	90	62.3	37.7

Sumber: Analisis Data Primer 2009

Berdasarkan tabel 6, jumlah perempuan yang terdaftar sebagai penerima manfaat jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Di antara 90 responden, 37,7 % diantaranya berjenis kelamin perempuan, sedangkan 62,3% laki-laki. Artinya, kegiatan pemberdayaan usaha program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul lebih difokuskan kepada laki-laki. Pengaruh utama gender belum menjadi fokus perhatian dalam kegiatan tersebut. Mengingat, usaha ekonomi rakyat sebagai upaya strategi adaptasi dalam rangka menanggulangi kemiskinan pada tingkat rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh perempuan dari pada laki-laki.

Akses terhadap sumber daya produktif yang belum proporsional tidak hanya berpengaruh terhadap keterbatasan aspirasi maupun kewenangan dalam mengambil keputusan. Namun, juga berdampak pada ketimpangan memanfaatkan hasil pembangunan. Di mana formulasi pembangunan belum berdasarkan kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis gender. Sebagaimana dikatakan oleh Zubaidi (2007: 213), Mosser lebih jauh menawarkan gagasan bahwa untuk setiap kegiatan atau program pembangunan, hal yang mendasar tidaklah hanya menjawab kebutuhan praktis gender (*gender praktis need*), tetapi juga kebutuhan strategis gender (*gender strategis need*). Pemenuhan kebutuhan ini menjadi solusi untuk mendistribusikan manfaat dari kegiatan pembangunan secara adil. Oleh sebab itu perlu rekonstruksi sosial, bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan didasarkan atas kapasitas yang dimiliki.

Kaum laki-laki dan perempuan mendapat peluang untuk terlibat dalam pembangunan secara proporsional, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan sebagai *test limust* dalam pembangunan. Sebagaimana diungkapkan dalam teori feminis liberal, bahwa perempuan bisa mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen bermoral dan bernalar. Kesetaraan gender akan tercapai dengan mengubah divisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci-hukum, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan (Ritzer dan Goodman, 2005: 420).

Berdasarkan pernyataan tersebut, ketimpangan gender dapat dihapus melalui perubahan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal. Di sisi lain, Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) mengatakan, bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata tetapi juga persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian penghasilan untuk konsumsi, ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya yang diwarisi dari satu generasi ke generasi. Sebagaimana dikatakan Naqilah (2005: 32) bahwa analisis gender dapat membongkar sekat ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin. Oleh karena itu kemiskinan perlu diartikulasikan dan dicarikan alternatif penyelesaian.

**Tabel 7.** Analisis Gender Berdasarkan Profil Kegiatan Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul

No	Kegiatan	L	BL	LP	BP	P
1.	Produksi					
	Informasi adanya bantuan modal usaha		√			
	Prosedur bantuan modal usaha		√			
	Kesempatan menjalankan usaha ekonomi produktif			√		
	Mengelola usaha ekonomi produktif			√		
	Membentuk kelompok usaha bersama			√		
	Mendapat mitra kerja	√				
	Mendapat akses pemasaran produksi	√				
2.	Reproduksi					
	Menyiapkan kebutuhan keluarga					√
	Membantu kegiatan ekonomi keluarga					√
	Mengelola ekonomi keluarga					√
3.	Jasa Masyarakat dan Jasa Rumah Tangga Utama					
	Investasi rumah tangga	√				
	Menentukan keputusan menjalankan usaha	√				
	Mengelola bantuan modal usaha			√		
	Memanagemen usaha secara mandiri		√			
	Investasi untuk masa depan			√		

Sumber: Analisis Data Primer Hasil FGD: 2009

Keterangan:

L : dominan dilakukan laki-laki

BP : dilakukan perempuan

BP : dilakukan laki-laki

P : dominan dilakukan perempuan

LP : dilakukan laki-laki dan perempuan

Paparan data tersebut menggambarkan, bahwa perempuan berada pada posisi minor untuk melakukan pekerjaan produktif. Di mana tugas dan tanggung jawab perempuan melakukan jenis pekerjaan reproduktif.<sup>5</sup>

Meskipun demikian kegiatan jasa masyarakat dan rumah tangga banyak dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, tabel 8 merupakan paparan data terpilah untuk menemukenali ketidakadilan gender pada kegiatan program Gerdu-Taskin berdasarkan profil akses dan kontrol pada sumberdaya produksi yang memungkinkan untuk dikerjakan laki-laki dan perempuan.

**Tabel 8.** Analisis Gender Profil Akses dan Kontrol pada Sumberdaya Produksi

Sumber Daya	Laki-Laki		Perempuan	
	Akses	Kontrol	Akses	Kontrol
Modal usaha	√	√	√	
Kepemilikan usaha	√	√		
Tenaga kerja	√	√	√	
Melakukan mitra usaha	√	√		
Memasarkan hasil produksi	√	√	√	

Sumber: Analisis Data Primer Hasil FGD, 2009

Berdasarkan tabel 8 ditemukan, pada tingkat rumah tangga, tempat kerja, maupun komunitas sosial masyarakat, perempuan belum memiliki kontrol atas penggunaan sumberdaya produktif. Selain itu, perempuan tidak memiliki aset usaha yang dijalankan. Selain itu, budaya telah membatasi perempuan untuk bermitra usaha. Akibatnya perempuan memiliki keterbatasan memasarkan hasil produksi.

**Tabel 9.** Analisis Gender Akses dan Kontrol pada Manfaat dari Kegiatan Pembangunan

Sumber Daya	Laki-Laki		Perempuan	
	Akses	Kontrol	Akses	Kontrol
Pelayanan simpan pinjam	√	√	√	√
Pembagian hasil usaha		√		
Kepemilikan aset usaha	√	√		
Kesempatan kerja	√	√	√	
Pembinaan	√	√		

Sumber: Analisis Data Primer Hasil FGD, 2009

Tabel 10. Matrik Analisis Gender Pada Program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul

Tujuan Kebijakan	Data Pembukaan Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Reformulasi Kebijakan	Indikator Gender	Rencana Aksi	Luaran
Penanggulangan krisis ekonomi tahun 1997 dengan konsep pemberdayaan manusia dan lingkungan. Yang bertujuan meningkatkan peran serta kelompok masyarakat miskin	Daftar penerima manfaat program Gerdu-Taskin di domain pinjaman modal usaha diberikan kepada 37% perempuan	Akses: kemampuan perempuan untuk mendapatkan informasi lebih kecil dibandingkan laki-laki. Akibatnya peluang yang dimiliki perempuan untuk mendaftar diri menjadi penerima manfaat jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki Partisipasi: Tingkat kehadiran maupun kontribusi perempuan dalam setiap kegiatan sangat minim. Akan tetapi perempuan memiliki kemampuan muskan kegiatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun laki-laki memiliki superotitas untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan Kontrol: Perempuan lebih banyak mengetahui penggunaan dana usaha pinjaman yang diberikan kepada laki-laki. akan tetapi tidak mengetahui laporan keuangan yang mestinya dibuat UPK Manfaat: Perempuan lebih memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi usaha ekonomi dibandingkan laki-laki.	Ases usaha ekonomi masih menjadi hak milik suami sebagai kepala keluarga Laki-laki lebih banyak yang terdaftar menjadi penerima manfaat dibandingkan perempuan Perempuan tidak memiliki otoritas untuk menentukan pilihan. Laki-laki mendominasi keputusan keluarga	Peningkatan kapasitas perempuan dan laki-laki dengan prinsip gender, dengan menetapkan program yang lebih memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis gender.	Perempuan memiliki kemampuan melakukan kontrol sosial terhadap usaha pokmas peminjaman Perempuan lebih dapat meningkatkan produksi usaha yang dijalankan Perempuan lebih dapat menyihkan hasil usaha yang telah dijalankan	Pemberdayaan perempuan dan laki-laki guna meningkatkan ekonomi rumah tangga.	Kemandirian laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber-daya yang berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, rumah tangga dan sosial.

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Tabel di atas menggambarkan, bahwa terdapat ketidakadilan gender pada program pembangunan. Di mana perempuan bersama laki-laki dapat mengakses sumber produktif. Akan tetapi, pada tingkat rumah tangga, perempuan belum memiliki kontrol. Pembinaan yang dilakukan *outsider* juga belum diperoleh perempuan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Untuk itu aplikasi analisis dengan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP) dilakukan, sehingga dapat menemukenali ketidakadilan gender dalam program Gerdu-Taskin. Tujuannya agar terdapat reformulasi kebijakan yang lebih responsif gender. Di mana hasil pembangunan dapat terdistribusi secara proporsional dan fungsional dengan prinsip keadilan.

## **Pemberdayaan masyarakat**

Program Gerdu-Taskin dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap awal, tahap penguatan, dan tahap pemandirian. Berdasarkan hasil PKIB dan hasil pemetaan yang dilakukan konsorsium Gerdu-Taskin, maka pada tahun 2005 Desa Suger Kidul ditetapkan sebagai lokasi sasaran tahap awal. Tahap penguatan program Gerdu-Taskin di Desa Suger Kidul dilaksanakan pada tahun 2007. Bentuk kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan tridaya, yaitu: pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia, dan pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan direalisasikan untuk kegiatan simpan pinjaman kepada masyarakat kategori RTMB. Tujuannya untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin yang seringkali dihadapkan pada persoalan modal. Kegiatan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk memperbaiki rumah masyarakat kategori RTMR guna meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan pemberdayaan lingkungan dilaksanakan untuk pengaspalan jalan secara swakelola oleh tim pelaksana.

Namun demikian, program pemberdayaan yang telah berjalan masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya masyarakat yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat masih membedakan peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Meskipun

ruang untuk perempuan telah disediakan guna melakukan kegiatan publik, akan tetapi ruang tersebut merupakan perpanjangan kegiatan domestik yang masih dibebankan kepada perempuan.

Kelembagaan agama di Desa Suger Kidul memiliki potensi untuk meningkatkan keberdayaan perempuan. Kelembagaan tersebut di laksanakan dalam bentuk kelompok *sarowa'an* yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kelompok *sarowa'an* dibentuk dari tingkat dusun sampai tingkat desa. Kegiatan *sarowa'an* diorganisir dalam sebuah struktur organisasi sederhana, terdiri atas: seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Pergantian kepengurusan dilakukan secara periodik sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok *sarowa'an*. Kegiatan *sarowa'an* diikat oleh arisan serta simpan pinjam serta dana sosial yang dialokasikan anggota untuk kepentingan bersama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin satu minggu sekali secara bergilir.

Penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa dalam kelompok *sarwa'an*, perempuan lebih memiliki ruang untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki. Dimana perempuan dapat terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Perempuan dapat menjadi pemimpin dan belajar untuk berorganisasi. Dalam kelompok *sarwa'an* perempuan ditempatkan sebagai manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, kelompok *sarwa'an* merupakan sarana yang paling efektif sebagai katalisator program Gerdu-Taskin. Akan tetapi peran tersebut masih belum difungsikan secara optimal.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki akses yang cukup tinggi untuk mendapatkan informasi program Gerdu-Taskin. Di sisi lain, perempuan di Desa Suger Kidul memiliki peran sebagai penopang kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar usaha ekonomi produktif dikelola dan dikembangkan oleh perempuan. Partisipasi perempuan untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan program Gerdu-Taskin minim dibandingkan laki-laki. Undangan rapat masih dit-

ujukan kepada laki-laki. Kehadiran perempuan pun belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin. Hal tersebut dikuatkan temuan bahwa jumlah perempuan sebagai daftar penerima manfaat relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya kontrol perempuan terhadap implementasi kebijakan program relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun dibandingkan laki-laki, perempuan lebih memiliki kemampuan untuk mengelola bantuan pinjaman modal, sehingga kemampuan perempuan menabung tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender dalam program Gerdu-Taskin belum dilakukan secara maksimal. Hal ini, didukung oleh berbagai data yang mensinyalir bahwa berbagai kebijakan untuk melaksanakan program Gerdu-Taskin masih bias gender. Perempuan ditempatkan pada posisi ter subordinat.

Penelitian ini menemukan potensi kelembagaan masyarakat di Desa Suger Kidul yang berpeluang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Akan tetapi, kelembagaan tersebut belum dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai dasar program pemberdayaan. Mengingat, perempuan belum ditempatkan sebagai subyek pembangunan dalam program Gerdu-Taskin. Akibatnya perempuan belum mengalami proses pemberdayaan secara maksimal seperti halnya laki-laki.

Kelembagaan masyarakat pada dasarnya merupakan pemicu awal untuk meningkatkan keberdayaan perempuan bersama laki-laki guna melakukan perubahan. Mengingat, kelembagaan masyarakat merupakan salah satu wadah untuk memenuhi kebutuhan komunitas masyarakat lokal. Dengan demikian program pembangunan dijalankan sesuai dengan tatanan masyarakat, tanpa terjadi pengingkaran budaya.

## **Kepustakaan**

Amien. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur. 2004. *Pedoman Umum Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur Tahun 2004*. Surabaya. Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Kecamatan Jelbuk dalam Angka*. Jember BPS.
- Budiman, A. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dian Rakyat. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, P. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Handayani dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: MM Pers.
- Irianto, S. 2004. Keadilan Sosial, Apakah Juga Ditujukan bagi Perempuan dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia. Jakarta. Kompas.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. 2005. *Panduan dan Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI Kerjasama dengan UNDP. 2007. *Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Indonesia*. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI Kerjasama dengan UNDP.
- Mosse, J. 2004. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naqilah, N. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rawls, J. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasuanto, B. 2005. *Keadilan Sosial: Padangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Utama.

Sulistiyani, A. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Sukei, K. 2003. *Paradigma Baru Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dalam Sugiarti, dkk Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press.

Suparjan dan Suyantno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Balai Pustaka.

Supeno, W. 2009. *Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wallace, R. ed. 1989. *Feminism and Sociological Theory*. London.

Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Melek Media Komputindo.

Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

\_\_\_\_\_. *Jatim Serious Merdekakan Masyarakat Miskin*. Diakses pada <http://www.gerdutaskin-jatim.com>. Diakses 3 Maret 2010.

---

1 Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan pokok non makanan, sedangkan keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan pokok.

- 2 Kementerian dan Pemberdayaan Perempuan, *Op. Cit.*, hlm.6
- 3 Dari hasil *World Survey on Women in Development* menyimpulkan bahwa wanita telah memberikan 66% dari jam kerjanya.
- 4 Hal ini sesuai dengan berbagai pernyataan bahwa perempuan bertanggungjawab terhadap 50% produksi pangan dunia.
- 5 Kegiatan reproduktif adalah segala kegiatan yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan dan berhubungan dengan alat reproduktif.

-oo0oo-

